

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Propinsi Riau

1. Sejarah

Pembentukan [Provinsi Riau](#) ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun ([17 November 1952](#) s/d [5 Maret 1958](#)).¹

a. Periode [5 Maret 1958-6 Januari 1960](#)

Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I [Sumatera Barat](#), [Jambi](#) dan [Riau](#), Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II, yaitu : [Bengkalis](#), [Kampar](#), [Indragiri](#), [Kepulauan Riau](#), termaktub dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negara tahun 1956 No.25) dan Kotaparaja [Pekanbaru](#), termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956.

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal [27 Februari 1958](#) No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di [Tanjung Pinang](#) oleh [Menteri Dalam Negeri](#) yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan di tengah-tengah klimaksnya gerakan koreksi dari daerah melalui [PRRI](#) di Sumatera Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikian, pemerintah daerah Riau yang baru

¹ Profil DPRD Propinsi Riau Periode 2009-2014, h. 10

terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.

Di Riau daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Indragiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di [Bengkalis](#) Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial kantor gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor gubernur TanjungPinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman.²

b. Pemindahan Ibukota

Karena situasi daerah telah mulai aman, maka oleh pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah mulai dipikirkan untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh, karena penetapan [Tanjung Pinang](#) sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal [30 Agustus 1958](#) No. Sekr. 15/15/6. Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat dipertanggung jawabkan, maka badan penasehat meminta kepada gubernur supaya membentuk suatu panitia khusus. Dengan surat keputusan gubernur kepala daerah swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No.21/0/3-D/58 dibentuk panitia penyelidikan penetapan ibukota daerah swatantra tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat, penguasa perang Riau daratan dan penguasa perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambil ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih Kota [Pekanbaru](#). Pendapat ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya

²*Ibid*

tanggal [20 Januari 1959](#) dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.³

c. Periode [6 Januari 1960-15 Nopember 1966](#)

Dengan dilantikannya Letkol Kaharuddin Nasution sebagai gubernur, maka struktur pemerintahan daerah tingkat I Riau dengan sendirinya mengalami pula perubahan. Badan penasehat gubernur kepala daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan ibukota dimulai. Rombongan pemindahan pertama dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmiah Pekanbaru menjadi ibukota.

Aparatur pemerintahan daerah, sesuai dengan Penpres No.6 tahun 1959 mulai dilengkapi dan sebagai langkah pertama dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian bertempat di gedung Pei Ing Pekanbaru dengan anggota-anggota terdiri dari :

- 1) [Wan Ghalib](#), 2) [Soeman Hs](#) dan 3) [A. Muin Sadjoko](#).

Anggota-anggota Badan Pemerintahan Harian (BPH) merupakan pembantu-pembantu gubernur kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di dalam rapat gubernur, Badan Pemerintah Harian dan Staff Residen [Mr. Sis Tjakraningrat](#), disusunlah program kerja pemerintah daerah, yang dititik beratkan pada :

- 1) Pemulihan perhubungan lalu lintas untuk kemakmuran rakyat.
- 2) Menggali sumber-sumber penghasilan daerah.
- 3) Menyempurnakan aparatur.

³*Ibid*, h. 11

Untuk penyempurnaan pemerintahan daerah, disusunlah DPRD-GR. Untuk itu ditugaskan anggota BPH Wan Ghalib dengan dibantu Bupati Dt. Mangkuto Ameh untuk mengadakan hearing dengan partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa dalam menyusun komposisi. Sesuai dengan itu diajukan sebanyak 38 calon anggota yang disampaikan kepada menteri dalam negeri Ipi Gandamana.

Usaha untuk menyempurnakan pemerintah daerah terus ditingkatkan, disamping gubernur kepala daerah, pada tanggal [25 April 1962](#) diangkat seorang [wakil gubernur](#) kepala daerah, yaitu Dt. Wan Abdurrahman yang semula menjabat [Walikota Pekanbaru](#), jabatan Walikota dipegang oleh [Tengku Bay](#).

Di samping penyempurnaan aparatur pemerintahan, oleh Pemerintah Daerah dirasakan pula bahwa luasnya daerah-daerah kabupaten yang ada dan batas-batasnya kurang sempurna, sehingga sering menimbulkan stagnasi dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan. Ditambah lagi adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-api dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten. Untuk itu maka oleh pemerintah daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan SK. No.615 tahun 1962 dibentuklah suatu panitia. Hasil kerja dari panitia tersebut menjadikan Provinsi Riau 5 (lima) buah daerah tingkat II dan 1 (satu) buah Kotamadya.

- a) Kotamadya Pekanbaru : Walikota KDH Kotamadya Tengku Bay.
- b) Kabupaten Kampar : Bupati KDH R. Subrantas.
- c) Kabupaten Indragiri Hulu : Bupati KDH. H. Masnoer.
- d) Kabupaten Indragiri Hilir : Bupati KDH Drs. Baharuddin Yusuf.
- e) Kabupaten Kepulauan Riau : Bupati KDH Adnan Kasim.

f) Kabupaten Bengkalis : Bupati KDH H. Zalik Aris.⁴

d. PascaReformasi

Seiring dengan berhembusnya “angin reformasi” telah memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Provinsi Riau sendiri. Salah satu perwujudannya adalah dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai di laksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 32 Provinsi. Tidak terkecuali Provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi ke-32 di Indonesia, itu berarti Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang hanya menjadi 12 Kabupaten/Kota.⁵ Kabupaten-kabupaten tersebut adalah :

No	Kabupaten /Kota	Kecamatan	Kel/Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
1	Kuantan Singingi	12	209	249.606	5.202.16
2	Indragiri Hulu	14	194	353.597	7.767.26
3	Indragiri Hilir	20	193	662.305	13.798.37
4	Pelalawan	12	118	253.308	12.404.14
5	Siak Sri Indrapura	14	113	387.579	8.233.57
6	Kampar	20	245	555.146	10.928.20
7	Rokan Hulu	16	151	346.848	7.229.78
8	Bengkalis	13	175	498.384	12.044.23
9	Rokan Hilir	13	121	552.433	8.961.43
10	Pekanbaru	12	58	850.023	633.01
11	Dumai	5	32	230.191	1.727.38
12	Meranti	6	73	216.329	3.707.84

Sumber : Profil DPRD Propinsi Riau Periode 2009-2014

⁴Ibid, h.13

⁵Ibid, h. 14

2. Kondisi Georafis dan Demografi

Propinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas $\pm 8.915.016$ Ha (89.150 Km^2), keberadaanya membentang dari lereng bukit barisan sampai selat Malaka terletak antara $01^0 05' 00''$ Lintang Selatan $02^0 25' 00''$ Lintang Utara atau antara $100^0 00' - 105^0 05' 00''$ Bujur Timur. Didaratan terdapat 15 sungai, diantaranya ada 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana penghubung seperti sungai siak (300 Km) dengan kedalaman 8-12 M, sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 M, Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman ± 6 M dan sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 M. Keempat sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut.⁶

Adapun batas-batas Propinsi Riau bila dilihat posisinya dengan Negara tetangga dan propinsi lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Propinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Jambi dan Sumatera Barat
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara

Hasil sensus penduduk Propinsi Riau pada bulan mei 2010. Jumlah penduduk Propinsi Riau menurut hasil olah cepat sebesar 5.543.031 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki 2.854.989 jiwa dan perempuan 2.688.042 jiwa.⁷

3. Klimatologi dan Topografi

⁶*Ibid*, h. 14

⁷*Ibid*

Daerah Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1000-3000 mm pertahun yang dipengaruhi oleh musim hujan dan kemarau. Selanjutnya menurut catatan stasiun meteorology suhu udaranya antara 21,0⁰-36,0⁰ Celcius.

Propinsi Riau memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2 % (datar) seluas 1.157.006 Hektar, kemiringan lahan 15-40 % (curam) seluas 737.966 Hektar dan daerah yang memiliki topografi yang memiliki kemiringan sangat curam (>40%) seluas 550.928 (termasuk propinsi kepulauan Riau) hektar dengan ketinggian rata-rata 10 Meter di atas permukaan laut. Secara umum topografi Propinsi Riau merupakan daerah daratan rendah dan agak bergelombang dengan ketinggian pada beberapa kota yang terdapat di Propinsi Riau antara 2-91 M di atas permukaan laut.⁸

4. Visi dan Misi (2009-2013)

a. Visi

Terwujudnya pembangunan ekonomi mapan, melalui kesiapan insfraktur, peningkatan pembangunan sektor pendidikan, serta memberikan jaminan kehidupan agamis dan pengembangan budaya melayu secara profesional.⁹

b. Misi

- 1) Mewujudkan pemerintahan daerah yang kemampuan, professional, bermoral serta keteladanan pemimpin dan aparat, melalui penguatan kelembagaan, kualitas aparat dengan sistem rekrutmen professional, penguatan belitbang, penggunaan ICT, penguatan *good governance* dan peningkatan pelayanan publik.
- 2) Mewujudkan SDM yang berkualitas dengan penekanan pada kemudahan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan pengembangan manajemen

⁸*Ibid*, h. 15

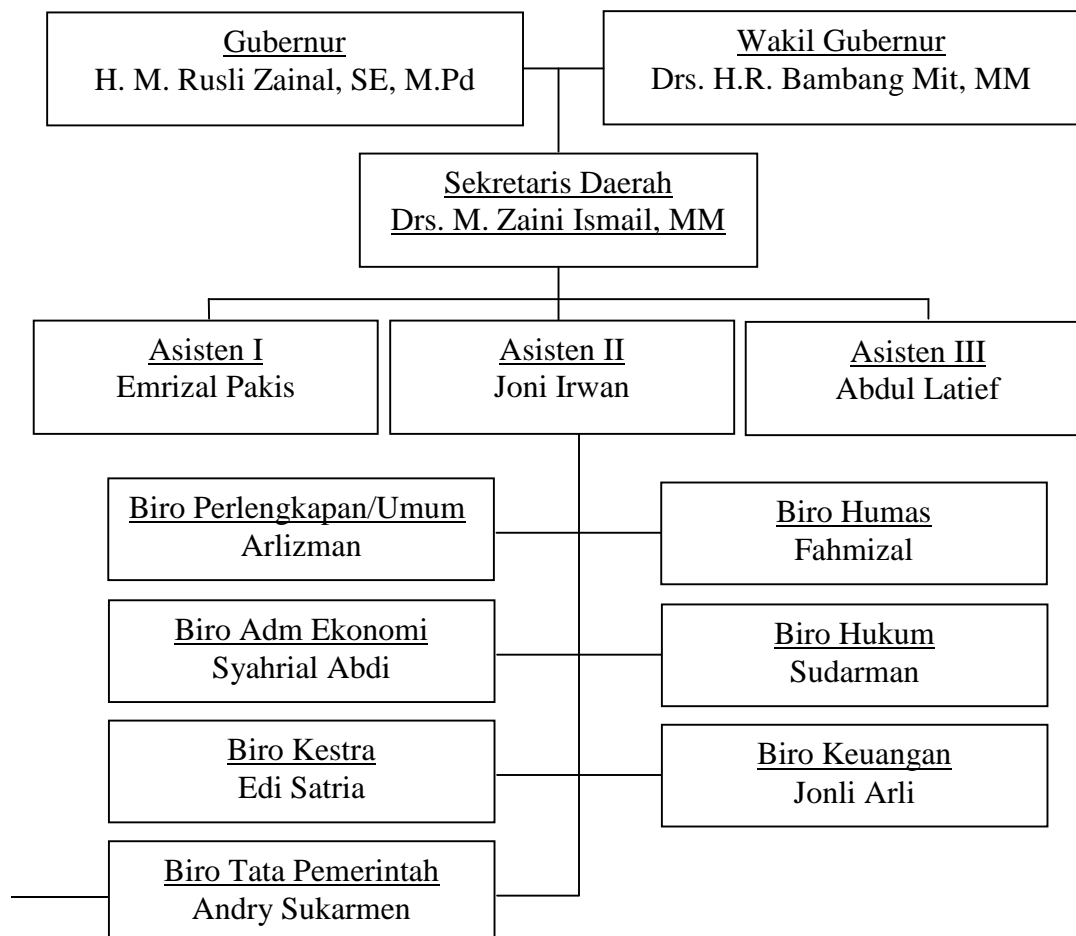
⁹*Ibid*, h. 27

pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta membangun sarana dan prasarana masyarakat beragama.

- 3) Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan terutama program pengentasan kemiskinan, pengentasan kebodohan dan pembangunan infrastruktur.
- 4) Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.
- 5) Mewujudkan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan sosialisasi dan ketrlibatan mereka dengan UMKM, koperasi serta pemberdayaan dasar yang berkualitas ekspor.
- 6) Mewujudkan UMKM dan koperasi yang kuat melalui pembinaan kelembagaan dan usaha, kemudahan akses modal, akses sarana dan prasarana produksi, dukungan teknologi dan riset, dukungan sarana transportasi dan distribusi serta kemudahan akses pemasaran.
- 7) Mewujudkan percepatan investasi dan stabilitas pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan rasa aman dengan kepastian hukum, percepatan pelayan izin usaha penyiapan infrastruktur serta sarana dan prasarana dasar, promosi dan media serta mitra usaha dagang.
- 8) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdepan dalam mengatasi berbagai permasalahan social dan ekonomi masyarakat perdesaan.

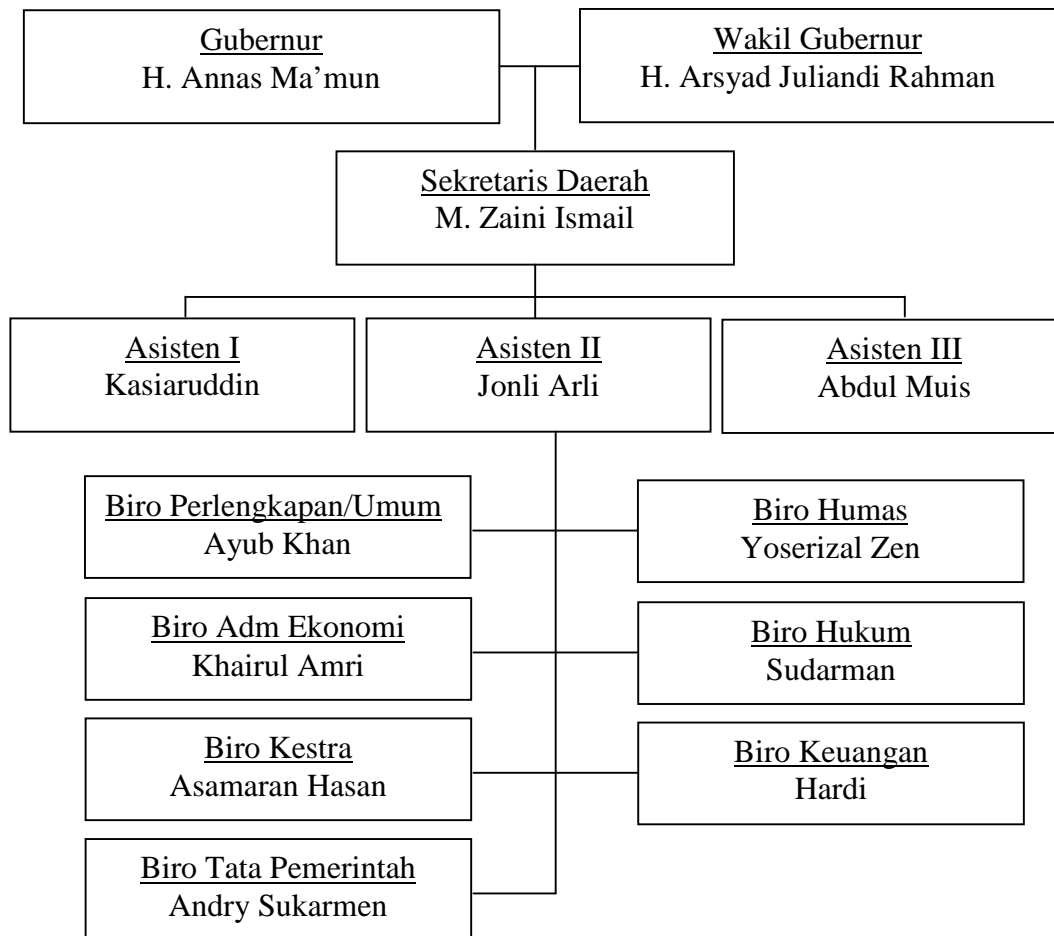
- 9) Mewujudkan subuah payung kebudayaan daerah yakni kelangsungan budaya melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaan, sebagai alat pamer satu dari berbagai etnis yang ada.
- 10) Mewujudkan tertib administrasi kependudukan daerah melalui pembangunan database penduduk Riau, digitasi nomor penduduk Riau dengan kartu digital.
- 11) Mewujudkan pembangunan berwawasan dan ramah lingkungan konsep pembangunan kawasan, perdesaan dan pemukiman perpadu.
- 12) Mewujudkan penanganan berbagai dampak dari isu pemasaran global (*global warning*), kenaikan BBM dan rawan pangan melalui penanganan berjangka pendek, berjangka menengah dan berjangka panjang.¹⁰

5. Struktur Pemerintahan Propinsi Riau Periode 2009-2014



Sumber : Profil Propinsi Riau Periode 2009-2014

6. Struktur Pemerintahan Propinsi Riau Periode 2014-219



Sumber : Profil Propinsi Riau Periode 2014-2019

B. Gambaran Umum DPRD Propinsi Riau

1. Sejarah

Semenjak pemindahan ibukota Propinsi Riau dari TanjungPinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmilah Pekanbaru menjadi ibukota propinsi Riau. Maka aparatur pemerintahan daerah Riau mulai dilengkapi sebagai langkah pertama dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian (BPH) bertempat di gedung Pei Ing Pekanbaru dengan anggota-anggota terdiri dari : 1) [Wan Ghalib](#), 2) [Soeman Hs](#) dan 3) [A. Muin Sadjoko](#).

Anggota-anggota Badan Pemerintahan Harian (BPH) merupakan pembantu-pembantu gubernur kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di dalam rapat gubernur, Badan Pemerintah Harian dan StaffResiden [Mr. Sis Tjakraningrat](#), disusunlah program kerja pemerintah daerah, yang dititik beratkan pada :

- a. Pemulihan perhubungan lalu lintas untuk kemakmuran rakyat.
- b. Menggali sumber-sumber penghasilan daerah.
- c. Menyempurnakan aparatur.

Untuk penyempurnaan pemerintahan daerah tersebut, disusunlah DPRD-GR. Untuk itu ditugaskan anggota BPH Wan Ghalib dengan dibantu Bupati Dt. Mangkuto Ameh untuk mengadakan hearing dengan partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa dalam menyusun komposisi. Sesuai dengan itu diajukan sebanyak 38 calon anggota yang disampaikan kepada menteri dalam negeri Ipi Gandamana. Ketika itu ditetapkan Khairuddin Nasution sebagai ketua DPRD Propinsi Riau.

2. Tugas dan Wewenang DPRD Propinsi Riau

Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum	
1) Pemerintahan umum	8) Kepegawaian/Aparatur
2) Perencanaan pembangunan	9) Sosial politik
3) Ketertiban dan keamanan	10) Organisasi masyarakat
4) Kependudukan	11) Perlindungan konsumen dan perjanjian internasional di daerah
5) Komunikasi/Pers	
6) Hukum/Perundang-undangan	
7) Perizinan dan pertanahan	

Sumber : Profil DPRD Propinsi Riau Periode 200-2014

Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan	
1) Perindustrian	11) Koperasi
2) Perdagangan	12) Dunia usaha dan penanaman modal
3) Pertanian	13) Keuangan daerah
4) Perikanan	14) Asset daerah
5) Kelautan	15) Perpajakan
6) Peternakan	16) Retrebusi
7) Perkebunan	17) Perbankan
8) Kehutanan	18) Perusahaan daerah dan patungan
9) Ketahanan pangan	
10) Pengadaan logistik	

Sumber : Profil DPRD Propinsi Riau Periode 200-2014

Komisi C Bidang Pembangunan	
1) Pekerjaan umum	6) Pertambangan dan energi
2) Pemetaan	7) Perumahan rakyat
3) Penataan dan pengawasan kota	8) Lingkungan hidup

4) Pertamanan	9) kebersihan
5) Perhubungan	

Sumber : Profil DPRD Propinsi Riau Periode 200-2014

Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat	
1) Ketenagakerjaan	7) Mesuem dan cagar budaya
2) Pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi	8) Social
3) Kepemudaan dan olahraga	9) Kesehatan dan keluarga berencana
4) Agama	10) Peranan wanita
5) Kebudayaan	11) Tranmigrasi
6) Pariwisata	

Sumber : Profil DPRD Propinsi Riau Periode 200-2014

3. Komisi DPRD Propinsi Riau

Komisi A

No	Nama	Jabatan	Fraksi	Dapil
1	Bagus Santoso, S.Ag., MP	Ketua	PAN	Bengkalis-Dumai
2	Jabarullah, S.Sos	Waket	PPP	Indragiri Hilir
3	Elly Suryani, SH	Sekretaris	Golkar	Indragiri Hilir
4	H. Masnur, SH	Anggota	Golkar	Kampar
5	H. Ruslan Jaya, SH., MH	Anggota	Golkar	Indragiri Hilir
6	Drs. H. Asrul Jaafar	Anggota	Demokrat	Inhu-Kuansing
7	H. Zukri Misran	Anggota	PDIP	Siak-Pelalawan
8	H. Darisman Ahmad, Lc., MA	Anggota	PKS	Kampar
9	H. Zurkarnaen Noerdin, SH., MH	Anggota	Gabungan	Bengkalis-Dumai

Sumber : Profil DPRD Propinsi Riau Periode 200-2014

Komisi B

No	Nama	Jabatan	Fraksi	Dapil
1	H.T. Azuwer, SE	Ketua	Demokrat	Rohul-Rohil
2	Drs. Zulfan Heri	Waket	Golkar	Bengkalis-Dumai
3	Ramli, FE, SE., MM	Sekretaris	Gabungan	Indragiri Hilir
4	Suparman, S.Sos	Anggota	Golkar	Rohul-Rohil
5	Hj. Sumiyanti, S.Sos., M.Si	Anggota	Golkar	Siak-Pelalawan
6	Dra. Hj. Rosvanilda Zulher	Anggota	Golkar	Kampar
7	Koko Iskandar	Anggota	Demokrat	Kampar
8	Lampita Pakpahan	Anggota	PDIP	Pekanbaru
9	T. Rusli Ahmad	Anggota	PDIP	Rohul-Rohil
10	Ir. H. Hazmi Setiadi, MT	Anggota	PAN	Siak-Pelalawan
11	H. Rusli Effendi, SE., M.Si	Anggota	PPP	Rohul-Rohil
12	Mahdinur, A.Md	Anggota	PKS	Bengkalis-Dumai
13	Riky Hariansyah, ST	Anggota	Gabungan	Siak-Pelalawan

Sumber : Profil DPRD Propinsi Riau Periode 200-2014

Komisi C

No	Nama	Jabatan	Fraksi	Dapil
1	H. Ilyas Labay, S.Sos	Ketua	Golkar	Bengkalis-Dumai
2	Dedet	Waket	Demokrat	Pekanbaru
3	Abdul Wahid, S.PdI	Sekretaris	Gabungan	Indragiri Hilir
4	Abu Bakar Siddik, S.Si	Anggota	Golkar	Inhu-Kuansing
5	Gumpita	Anggota	Golkar	Pekanbaru
6	Tabrani Maamun	Anggota	Golkar	Rohul-Rohil
7	Rita Zahara	Anggota	Demokrat	Indragiri Hilir
8	Robin P. Hutagalung, SH	Anggota	PDIP	Pekanbaru
9	H. James Pasaribu	Anggota	PDIP	Indragiri Hilir
10	Ir. H. A Kirjuhari	Anggota	PAN	Rohul-Rohil
11	H. Aziz Zainal, SH., MH	Anggota	PPP	Kampar
12	Drs. H. Mohammad Roem Zein	Anggota	PPP	Pekanbaru

13	H. Syafruddin Sa'an, Lc	Anggota	PKS	Rohul-Rohil
14	Solihin Dahlan	Anggota	Gabungan	Bengkalis-Dumai

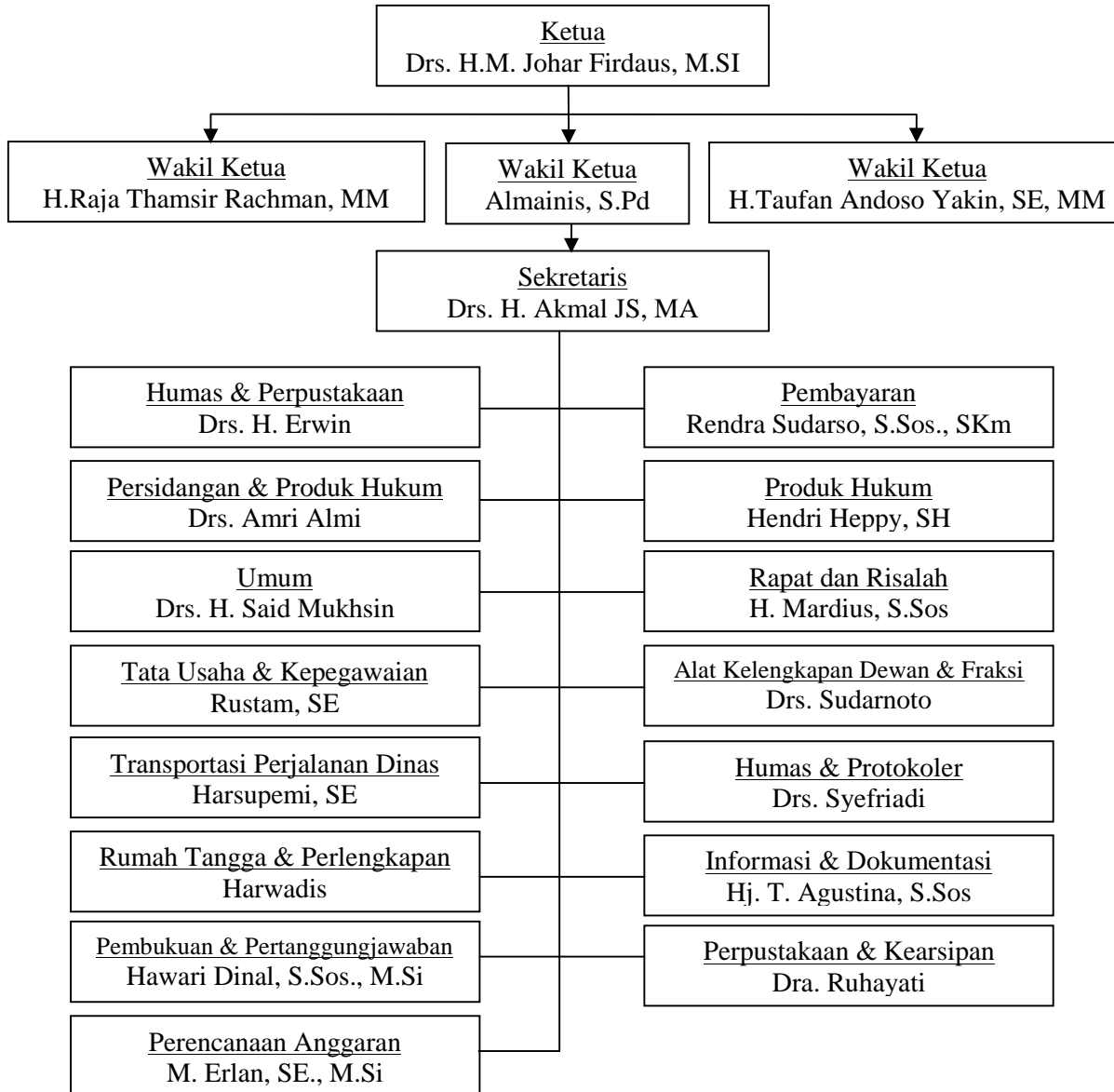
Sumber : Profil DPRD Propinsi Riau Periode 200-2014

Komisi D

No	Nama	Jabatan	Fraksi	Dapil
1	H. Syarif Hidayat, SH	Ketua	PPP	Inhu-Kuansing
2	Drs. H. Adrian Ali	Waket	PAN	Inhu-Kuansing
3	Hj. Supriati, S.Sos	Sekretaris	Gokar	Inhu-Kuansing
4	H. Syamsuri Latief	Anggota	Golkar	Indragiri Hilir
5	Dra. Hj. Iwa Sirwani Bibra	Anggota	Golkar	Pekanbaru
6	Hj. Mukhniarti, SE	Anggota	Demokrat	Pekanbaru
7	M. Yatim	Anggota	Demokrat	Siak-Pelalawan
8	A.B. Purba, SH., MH	Anggota	PDIP	Kampar
9	Drs. Toroechan Asy'ari	Anggota	PDIP	Inhu-Kuansing
10	H. Ramli Sanur	Anggota	PAN	Pekanbaru
11	Dra. Hj. T. Nazlah Khairati	Anggota	PPP	Bengkalis-Dumai
12	H. Mansur	Anggota	PKS	Pekanbaru
13	H. Indra Isnaini, ST	Anggota	PKS	Siak-Pelalawan
14	Muhammad Dunir, S.Ag	Anggota	Gabungan	Inhu-Kuansing
15	Ir. Nurzaman	Anggota	Gabungan	Bengkalis-Dumai

Sumber : Profil DPRD Propinsi Riau Periode 200-2014

4. Struktur DPRD Propinsi Riau Periode 2009-2014



Sumber : Profil DPRD Propinsi Riau Periode 2009-2014